

Senin Pahing, 9 Maret 2014

HALAMAN 2

JK Sindir Denny Indrayana tak Sportif

■ Dessy Suciati Saputri

JAKARTA — Mantan wakil menteri Denny Indrayana telah mendatangi kantor Sekretaris Kabinet, Jakarta, Jumat (6/3). Kedatangannya tersebut terkait klaim kriminalisasi yang dilakukan Polri pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para pendukungnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun meminta agar Denny bersikap sportif terkait tuduhan korupsi dalam proyek *payment gateway*. "Ya itu tidak sportif. Datang *dong* ke Polri bahwa saya tidak salah. Jangan datang bahwa saya tidak salah," kata JK di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (7/3).

JK meminta guru besar hukum UGM tersebut agar tak membentuk opini serta menjelaskan masalah yang menjeratnya. "Jangan membentuk opini, jelaskan masalahnya bahwa masalah ini saya tidak salah," kata Kalla.

Lebih lanjut, seluruh warga ne-

gara yang diduga melakukan tindakan korupsi, menurutnya harus menjalani pemeriksaan. Hal ini pun juga berlaku terhadap Denny yang gencar memberikan pembelaan kepada KPK, namun tak memenuhi panggilan Bareskrim Polri.

"Jangan karena saya pegiat antikorupsi maka jangan saya diperiksa. Salah itu... Masa maunya 'karena saya pahlawan antikorupsi maka jangan saya diperiksa'. Salah *dong gitu*," kata JK menegaskan.

JK menerangkan, kriminalisasi merupakan tuduhan kepada seseorang yang hanya dibuat-buat saja dan tak berdasarkan fakta. Sedangkan, pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan fakta yang ada bukanlah tindakan kriminalisasi.

Sebelumnya, Denny menolak memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa dalam dugaan kasus korupsi proyek *payment gateway* dalam fasilitas pelayanan publik. Alasannya, ia patuh pada instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kriminalisasi pada

KPK dan pendukungnya dihentikan.

Ia pun mengadukan hal ini kepada pihak Sekretaris Kabinet untuk mengadukan kriminalisasi Polri terhadap KPK dan aktivis antikorupsi. Selain Denny, juga datang Bambang Widjojanto dan Yunus Husein.

Tak kompak

Menanggapi pernyataan JK, kuasa hukum Bambang Widjojanto, Dadang Tri Sasongko, menilai publik akan menilai Jokowi JK tidak kompak. "Kesan kuat yang saya dapat, JK-Jokowi sedang berbeda pendapat tentang sikap kriminalisasi yang terjadi," ujar Dadang.

Menurutnya, Presiden saja sudah memerintah untuk Polri menghentikan kriminalisasi terhadap tiga pegiat korupsi tersebut. Namun, melihat sikap JK yang mendesak tiga aktivis antikorupsi tersebut memenuhi panggilan Bareskrim, Dadang menilai, JK sudah berseberangan dengan perintah Presiden.

■ c15 ed: muhammad hafil